

KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM ERA DISRUPSI GLOBALISASI

Rahmadi Indra Tektona
Universitas Jember
Email: rahmadiindra@unej.ac.id

Informasi Artikel:

Dikirim: (11 Februari 2021) ; Direvisi: (19 April 2022); Diterima: (25 April 2022)

Publish (26 April 2022)

Abstrak: Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Era Disrupsi Globalisasi. Era yang serba digital dan berkembangnya konstelasi kehidupan menyebabkan adanya perubahan dalam berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Pendidikan di era disrupsi globalisasi mengalami perubahan dalam segi materi, aktivitas, dan proses pembelajarannya. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sebagai bagian penting dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang kompeten, adaptif, dan mampu bersaing di era disrupsi globalisasi harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Metode Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori kebijakan sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pendidikan kewarganegaraan dalam era disrupsi globalisasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam upaya mempersiapkan warga negara yang baik, dalam hal ini memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skills*), karakter kewarganegaraan (*Civic Dispositions*). Selanjutnya, perlu melakukan pembaharuan berupa perubahan dan perbaikan secara komprehensif untuk kemajuan dalam dunia pendidikan itu sendiri.

Kata Kunci: Kebijakan, pendidikan kewarganegaraan, disrupsi, globalisasi

Abstract: The Civic Education Policy in the Globalization Disruption Era. Digital era and constellations development of life cause changes in various sectors, including the education sector. Education in the globalization disruption era has experience changes in terms of materials, activities, and learning process. Civic education in Indonesia as an important part of the education system intend to forming competent citizens, adaptive citizens, and able to competate in this era by based on Pancasila's values. The Research Methods in this article use qualitative descriptive methods with policy theory as the analysis tools. This research aims to find out and analyze citizenship education policies in the era of globalization disruption. The results of this study explain that civic education plays an important role in efforts to prepare good citizens, in this case having citizenship knowledge (*Civic Knowledge*), civic skills (*Civic Skills*), civic character (*Civic Dispositions*). Furthermore, civic education policy need a change and improvement comprehensively to be meliorate in the education sector.

Key Word: Policy, civic education, disruption, globalization

PENDAHULUAN

Penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 181,3 juta jiwa atau setara

dengan 68,6 persen dari jumlah keseluruhan penduduk, dengan angka ketergantungan usia muda dan tua hanya

mencapai 45,7 persen yang terbilang rendah. Tingginya jumlah penduduk produktif dan rendahnya angka ketergantungan menjadi faktor terjadinya perubahan struktur penduduk di Indonesia, sehingga dapat membuka peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penghasilan negara Indonesia menjadi menengah ke atas. Bonus demografi (*demographic dividend*) merupakan kesempatan yang harus benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk yang paling mendasar adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dapat memberikan keuntungan dalam terjadinya bonus demografi.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, kreatif, inovatif, terampil, dan adaptif yang belum dapat terpenuhi secara optimal menjadi penyebab rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia. Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi di Indonesia berdasarkan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional bulan Agustus tahun 2018 terbilang rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, yaitu hanya sekitar 39,57 persen. Pekerja didominasi oleh tenaga kerja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah, yaitu 58,77 persen. Kurangnya

potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dapat memutarbalikkan keadaan, yang mana Bonus demografi malah dapat menjadi ancaman dan merugikan negara. Ketidakseimbangan antara tersedianya pekerja yang berkualitas dengan standar kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Dampak buruknya juga akan meningkatkan jumlah kemiskinan, sehingga berpengaruh buruk pada kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

Era digital dan berkembangnya konstelasi kehidupan menuntut adanya perubahan dalam berbagai aspek, termasuk aspek pendidikan. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi covid-19, pendidikan menjadi salah satu yang paling terdampak dan diharuskan melakukan perubahan dalam proses berlangsungnya. Proses belajar-mengajar yang dulunya dilakukan secara tatap muka langsung kini berubah dilakukan secara tidak langsung atau *online*. Pendidikan sebagai unsur terpenting suatu negara sangat berpengaruh bagi tolak ukur kemajuan suatu negara. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education/citizenship education/democracy education*) merupakan salah satu pendidikan yang diajarkan dan dikembangkan diseluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Revolusi industri 4.0 yang terjadi di era globalisasi menjadi pembuka adanya

perubahan dalam berbagai segi kehidupan. Perubahan yang sangat jelas terjadi pada sektor ekonomi, terlihat dari banyaknya mall yang gulung tikar, perusahaan yang dulunya besar dan mendominasi pasar seperti nokia dan siemen sekarang hanya tinggal cerita. Profesi tertentu yang menghilang karena tidak diperlukan lagi juga perlu diwaspadai. Perusahaan yang stagnan tidak bisa mengikuti perkembangan maupun perubahan, maka tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan lain, sehingga akan terpengaruh inovasi disruptif. Inovasi disruptif dapat menjadi ancaman bagi pengusaha konvensional dan bagi konsumen yang terbiasa dengan produk lama yang sudah ada (Clayton dkk., 2015).

Era globalisasi memaksa adanya inovasi di berbagai sektor dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensinya. Sektor pendidikan juga termasuk yang perlu adanya inovasi. Generasi milenial yang sejak lahir terkoneksi dengan teknologi menambah alasan perlunya inovasi dalam pendidikan. Perubahan dari tradisional ke dunia teknologi menimbulkan pergeseran paradigma dalam sektor pendidikan. Pendidikan di masa lalu menanamkan akhlak yang baik pada subjek didiknya sebagai upaya pembentukan karakter. Kini beralih menjadi pendidikan yang meningkatkan kecerdasan dan prestasi daya saing pada

subjek didiknya. Perkembangan teknologi menuntut adanya perubahan metode dan pendekatan pembelajaran. Instansi pendidikan harus dinamis dan tidak apatis dengan adanya perubahan dan inovasi. Kecenderungan tekanan global mewujudkan paradigma baru dalam pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi untuk membentuk masyarakat demokratis yang diharapkan dapat bertahan menghadapi era globalisasi dan era disrupsi.

Esensi pendidikan kewarganegaraan yang merupakan bagian penting dari sistem pendidikan dalam suatu negara agar warga negara memiliki pengetahuan (*knowledge*), nilai (*values*), dan keterampilan (*skills*) yang nantinya dapat menciptakan warga negara yang kompeten (Ananda, 2005). Indonesia sebagai negara kepulauan yang plural terdiri dari beragam suku, bangsa, budaya, dan adat istiadat. Kemajemukan Indonesia merupakan karunia Tuhan. Persatuan dan kesatuan menjadi kekuatan yang apabila goyah dapat menjadi kelemahan. Semua hal tersebut harus dimulai dari pendidikan dasar yang dilandasi oleh jiwa pancasila yang kuat. Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu solusi utama sebagai sarana untuk mempersiapkan warga negara yang baik di tengah kompleksitas keberagaman yang dimiliki Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan secara filosofis sebagai

fondasi kekuatan ligatur pembentukan mental demi mewujudkan cita-cita nasional dan modernisasi tanpa meninggalkan tradisi dan kearifan lokal yang telah diajarkan oleh para leluhur.

Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Demi mencapai tujuan tersebut, diarahkan suatu kebijakan pembangunan manusia yang difokuskan pada pengendalian dan penguatan tata kelola pendudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas diri, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan tersebut dilakukan berdasar pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut dan penduduk penyandang disabilitas.

Hadirnya era baru menggeser paradigma yang sudah mapan (Mukhadis, 2013). Konsep kurikulum dalam pendidikan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teori, praktik, dan tujuan pendidikan, serta disesuaikan dengan variasi aliran atau teori pendidikan yang dianut oleh masing-masing negara. RPJPN 2005-2025 menentukan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan

pembangunan di berbagai bidang, dan terwujudnya struktur perekonomian yang kuat didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (Bapennas, 2021).

Dari uraian fakta diatas maka penulis tertarik untuk membuat artikel dengan judul *Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Era Disrupsi Globalisasi*. Pokok pembahasan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yaitu pendidikan kewarganegaraan, disrupsi globalisasi, pendidikan di era disrupsi globalisasi, dan kebijakan pendidikan kewarganegaraan di era disrupsi globalisasi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Obyek penelitian ini membahas mengenai kebijakan pendidikan kewarganegaraan dalam era disrupsi globalisasi. Penulis melakukan analisis mengenai kejadian atau keadaan sosial dari data kualitatif kemudian dijabarkan secara deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam melakukan pengkajian adalah beberapa pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel ilmiah yang sesuai dengan rumusan masalah kemudian dianalisis sesuai dengan topik yang dibahas. Batasan penelitian dalam konteks ini lebih dimaknai agar penelitian ini lebih efektif, efisien, dan terarah berkaitan dengan kebijakan pendidikan

kewarganegaraan di era disrupsi globalisasi yang harusnya dirancang oleh pemerintah untuk menjawab tantangan perkembangan jaman guna mempersiapkan generasi penerus yang unggul sesuai dengan cita-cita bangsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap warga negara tanpa terkecuali berhak untuk mendapat pendidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Warga negara dari latar belakang apapun berhak mendapat pendidikan yang sama dan dijamin oleh negaranya. Di Indonesia, mendapatkan pendidikan merupakan hak bagi seluruh warganya dan merupakan bagian dari keadilan sosial dimana tidak ada golongan, lapisan, kelompok satuan, atau organisasi yang diperlakukan sebagai anak emas atau diberi perlakuan khusus atau diberlakukan istimewa. Keadilan sosial dalam hal ini merujuk pada keadilan penerapan peraturan dan tatanan kemasyarakatan untuk memperoleh pendidikan. Menurut Ki Supriyoko, pendidikan adalah strategi untuk meningkatkan kualitas manusia (Pahlevi, 2017). Era ini menuntut adanya pembangunan, yang mana pembangunan paling mendasar dilakukan melalui pendidikan untuk menciptakan warga negara yang kompeten.

Pendidikan kewarganegaraan (*civic education/citizenship education/democracy*

education) merupakan pendidikan mendasar yang diajarkan diseluruh negara, termasuk di Indonesia. *Citizenship Education is the course of study that teaches students that are necessary to live in a state ort society* (USAID, 1994:10). Jadi dapat disimpulkan bahwa warga negara yang baik tergantung pada sistem kenegaraan atau kaidah yang berlaku dalam suatu negara. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia diajarkan dalam pendidikan formal mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi.

Kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, yang secara etimologi terdiri dari kata “Polis” yang berarti kota. Kebijakan dalam hal ini berkaitan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang dapat diterima pemerintah atau lembaga untuk mengejar tujuannya (Syafaruddin, 2008). Kebijakan merupakan keputusan formal organisasi yang dituangkan dalam aturan tertulis yang sifatnya mengikat dan mengatur perilaku masyarakat dengan tujuan menciptakan tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai rujukan dalam berperilaku (Dunn, 2003). Pada umumnya kebijakan bersifat problem solving, proaktif, serta lebih adaptif dan interpretatif dibandingkan dengan hukum (*law*) dan peraturan (*regulation*).

Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu ajaran yang didalamnya memuat pola-pola hubungan yang terjadi antara negara dengan warganegara atau individu dengan negara. Hubungan yang dimaksud yaitu hubungan yang bersifat publik, karena menjadi individu yang ada dalam suatu negara berarti dengan sendirinya menjadi anggota dari satu komunitas politik (*political community*). Dalam komunitas politik terdapat berbagai aspek yang diatur oleh hukum yang berdasar pada suatu proses di negara tertentu, seperti ideologi, sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, hak kewajiban, dan lain sebagainya. Kebijakan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kebijakannya dibuat oleh negara, yaitu berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
2. Kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di wilayah lembaga publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama dan/atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu (Nugroho, 2008).
3. Kebijakan publik jika terdapat tingkat eksternalitas yang tinggi, yaitu dimana pemanfaatan atau yang

terpengaruh bukan saja pengguna langsung tapi juga yang tidak langsung.

Indonesia sebagai negara merdeka menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai identitas nasional dan kekuatan pemersatu bangsa Indonesia yang plural harus hidup dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia bertujuan agar terciptanya manusia yang berkualitas, profesional, rasional, demokratis, memiliki jiwa kebangsaan dan cinta tanah air, beradab, disiplin, berdaya saing, serta berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan yang berdasar pada nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila telah ada sejak jaman dahulu dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat yang dikritisasi ke dalam lima silanya. Program pendidikan kewarganegaraan berintikan demokrasi politik yang kemudian diperluas dan diproses dengan sumber-sumber pengetahuan lain, pengaruh positif dari lingkungan yaitu pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu tetap berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Bangsa Indonesia menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pijakan dalam berfikir dan bertindak. Pendidikan kewarganegaraan berperan

strategis dalam pembentukan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk peserta didik agar menjadi “warga negara yang baik” (Muchson, 2004:33). Standarisasi warga negara yang baik harus memenuhi 3 (tiga) poin yaitu: pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skills*), karakter kewarganegaraan (*Civic Dispositions*).

Globalisasi merupakan suatu proses sosial, sejarah, alamiah yang nantinya akan membawa bangsa dan negara di seluruh dunia semakin terikat satu sama lain, sehingga terwujud tatanan kehidupan yang baru dengan mengesampingkan batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat (Mahfud, 2008). Terjadinya globalisasi dapat ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Meningkatnya keterkaitan antar negara, hal ini dapat dilihat kapal-kapal pengangkut barang antar negara yang hilir mudik;
- b. Konstalasi ruang dan waktu yang berubah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, adanya *smartphone*, televisi satelit, dan internet mempercepat komunikasi global;
- c. Produksi dan pasar ekonomi antar negara saling bergantung karena

adanya pertumbuhan perdagangan internasional dan pengaruh perusahaan multinasional;

- d. Meningkatnya interaksi kultur melalui perkembangan media massa, seperti televisi, musik, film, dan transmisi berita internasional;
- e. Meningkatnya permasalahan bersama, seperti permasalahan pemanasan global, lingkungan hidup, krisis multinasional, pandemi covid-19, dan lain sebagainya.

Globalisasi juga dapat ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi yang begitu pesat, sehingga membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah satu kesatuan tanpa ada batas negara (Darani, 2015). Kondisi demikian akan memberikan pengaruh pada pola pikir, sikap, dan tindakan masyarakat.

Disrupsi merupakan sebuah era dimana terjadi inovasi dan perubahan sistem lama dengan cara yang baru. Teknologi lama yang serba fisik diganti dengan teknologi digital yang lebih baru dan efisien (Kumparan, 2021). Disrupsi telah ada sejak lama, namun kembali populer setelah dibahas dalam buku *The Innovator Dilemma* karya Clayton M. Chirtensen yang merupakan guru besar *Harvard Business School* di Boston. Buku tersebut membahas mengenai perusahaan

baru dengan skala yang masih kecil dapat menundukkan perusahaan besar yang memiliki aset, sumber daya, dan koneksi yang banyak. Disrupsi menyebabkan perubahan fundamental pada semua tatanan yang terjadi secara langsung dan mengarah bagian dasar.

Masyarakat di era disrupsi menggeser aktivitas yang semula dilakukan di dunia nyata, beralih ke dunia maya. Perubahan dalam era disrupsi terjadi dalam berbagai sektor. Di Indonesia disrupsi pada bisnis dapat dilihat dengan hadirnya *marketplace* alternatif yang memudahkan transaksi antara produsen dan konsumen, seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak. Disrupsi pada bidang informasi dapat dilihat dengan hadirnya local guides dan youtube. Disrupsi pada bidang sosial budaya dapat dilihat dengan maraknya pembangunan pariwisata di berbagai daerah (Purwowibowo dkk., 2017). Disrupsi juga berpengaruh dalam dunia pendidikan. Di tahun 2020 dapat dikatakan kita sudah mengalami disrupsi pada segala sektor, yang salah satunya diakibatkan oleh pandemi covid-19. Disrupsi di sektor pendidikan dapat dilihat dengan adanya perubahan drastis pada aktivitas dan proses pembelajaran. Kondisi ini memaksa penggunaan teknologi dan internet untuk proses pembelajaran.

Disrupsi dapat membuka peluang untuk menciptakan kemajuan, namun apabila peluang tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan berbalik menjadi kerugian. Berikut adalah cara menghadapi disrupsi agar tidak tertinggal dan berdampak negatif, yaitu:

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pemanfaatan adanya disrupsi. Sumber daya yang berkualitas dapat mudah beradaptasi dan siap dengan perubahan. Sumber daya manusia yang menguasai teknologi mampu mengejar ketertinggalan dan mempunyai daya saing.

2) Terus Berinovasi

Zaman selalu berkembang, sehingga inovasi adalah kunci untuk mampu bertahan dalam disrupsi. Melihat kilas balik perkembangan dari ponsel menuju *smartphone*, keterlambatan Nokia dalam membuat inovasi android membuatnya tidak dapat bertahan dengan baik. CEO Nokia, Stephen Elop pada saat menyerahkan perusahaannya pada Microsoft mengatakan “*we don’t do anything wrong but then we lost*”. Keterlambatan inovasi Nokia

menjadi contoh betapa pentingnya untuk terus berinovasi.

3) Melek Teknologi

Dengan adanya teknologi segala pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien. Contoh manfaat teknologi yaitu adanya m-banking, e-commerce, dan lain sebagainya. Kemampuan untuk mengoperasikan teknologi sangat dibutuhkan di era disrupsi yang segala sesuatunya menggunakan teknologi.

4) Siap dengan Perubahan

Perubahan di era disrupsi terjadi secara masif dan sangat cepat, oleh sebab itu masyarakat harus selalu siap dengan perubahan yang terjadi. Masyarakat yang tidak siap dengan perubahan akan tertinggal dan dapat dikatakan kalah dalam persaingan (Devidigital, 2021).

Di era disrupsi kita dihadapkan pada dua pilihan, menciptakan yang baru (*create*) dengan berani berinovasi sesuai dengan kebutuhan atau membentuk ulang (*reshape*) dengan melakukan inovasi pada apa yang sudah dimiliki.

Pendidikan sebagai unsur penting dalam suatu negara memiliki pengaruh yang besar terhadap kemajuan suatu negara. Tingkat kebutuhan pendidikan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Di era disrupsi

globalisasi pendidikan mengalami perubahan dengan munculnya proses pembelajaran online melalui kelas virtual. Proses pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Putranti, 2016). Kondisi di masa pandemi juga berdampak pada pendidikan dan memaksa penutupan sementara lembaga pendidikan demi menekan penyebaran covid-19, sehingga proses pembelajaran dilakukan secara daring.

Sejalan dengan adanya disrupsi globalisasi, kebijakan pendidikan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi atas (Samsuri, 2011):

1) Inisiasi internal (*internal initiation*)

Upaya perubahan kebijakan pendidikan yang datang dari kalangan profesi pendidikan sebagai internal pendidikan itu sendiri.

2) Transaksi eksternal (*external transaction*)

Transaksi eksternal dilakukan dengan cara negosiasi antara internal pendidik dan kelompok kepentingan eksternal.

3) Manipulasi politik (*political manipulation*)

Manipulasi politik merupakan pengaruh dari pemerintah untuk memberi dukungan atau penolakan terhadap alokasi nilai yang

diperjuangkan sebagai kebijakan publik.

Kebijakan dalam pendidikan kewarganegaraan perlu diperhatikan lebih seiring dengan adanya disrupsi globalisasi yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan pendidikan kewarganegaraan perlu melakukan pembaharuan berupa perubahan dan perbaikan secara komprehensif untuk kemajuan dalam dunia pendidikan itu sendiri. *Great ought* pendidikan kewarganegaraan setiap negara adalah dasar dari sistem politik negara tersebut. Dasar yang dijadikan pedoman oleh negara Indonesia adalah Pancasila, sehingga pendidikan kewarganegaraan yang merupakan upaya untuk pembentukan warga negara juga harus berdasar pada Pancasila sebagai dasar negaranya.

Pendidikan kewarganegaraan berperan strategis dalam upaya mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Pendidikan kewarganegaraan juga berperan penting untuk pertumbuhan budaya masyarakat (*civic culture*). Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas masyarakat. Oleh sebab itu diajarkan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Persoalan kehidupan warga negara yang telah mengalami globalisasi (*globalized*) membuka minat baru dunia terhadap pendidikan kewarganegaraan (Patrick, 2002). Kajian pendidikan kewarganegaraan pada tingkat global telah memiliki arti penting. Pendidikan kewarganegaraan di masa depan nantinya akan terkait dengan masalah-masalah perjuangan yang bertujuan untuk mendapatkan redistribusi, pengakuan (*recognition*), kewarganegaraan versus hak asasi manusia (*citizenship versus human rights*), dan kewarganegaraan global versus kewarganegaraan kosmopolitan (*global citizenship versus cosmopolitan citizenship*).

Disrupsi globalisasi menyebabkan adanya tuntutan pergeseran paradigma pada pendidikan kewarganegaraan, yang disebabkan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap diri maupun lingkungannya. Disrupsi globalisasi membawa perubahan paradigmatik pada kajian dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Salah satunya berubahnya standarisasi kompetensi lulusan dan tenaga pengajar yang semakin memantapkan kedudukan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran pengembangan kepribadian. Namun di sisi lain disrupsi globalisasi menjadi tantangan bagi para pengembang pendidikan kewarganegaraan agar

berusaha lebih keras untuk melakukan pengembangan substansi kajian bahan ajar.

Kebijakan pendidikan kewarganegaraan telah dilaksanakan di lembaga formal, seperti di sekolah dan institusi pendidikan tinggi, namun permasalahan krisis moral khususnya di Indonesia tidak akan pernah berhenti berkembang. Sehingga hal tersebut yang melatar belakangi betapa pentingnya kebijakan pendidikan kewarganegaraan sebagai fondasi pembentukan warga negara yang baik dan mampu bertahan di era disrupsi globalisasi.

Permasalahan utama pendidikan di Indonesia menurut Azra (2001) berakar dari adanya krisis moral, yaitu:

- a) Hilangnya objektivitas orientasi pendidikan telah kehilangan objektivitasnya;
- b) Kematangan diri yang terjadi secara tidak tepat di lingkungan sekolah;
- c) Terbatasnya proses pendidikan di sekolah, seperti terbatasnya ruang untuk kreativitas baik bagi siswa ataupun guru;
- d) Beban kurikulum yang terlalu memberatkan dan lebih cenderung berorientasi pada pengembangan domain kognitif;
- e) Belum diprioritaskannya materi pembelajaran seperti pendidikan

agama, pendidikan moral, atau pendidikan kewarganegaraan;

- f) Siswa dihadapkan dengan nilai-nilai yang bertentangan; dan
- g) Minimnya teladan moral yang hidup dalam kehidupan sehari-hari para siswa.

Kebijakan pendidikan kewarganegaraan penting bagi setiap negara sebagai upaya pembangunan karakter nasional untuk mempertahankan eksistensi dihadapan negara lain. *The founding father* Indonesia, Ir. Soekarno berhasil membudayakan benih karakter nasional yang terbukti dengan keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan (Pratama, 2020). Suatu bangsa dapat dikatakan sebagai bangsa yang maju dan kuat apabila nilai-nilai dasar yang menjadi pedomannya dapat tercermin dalam perilaku masyarakatnya sehari-hari. Sehingga tidak akan ada lagi perilaku menyimpang, penjajahan, diskriminasi, maupun perilaku negatif lainnya.

Kebijakan menanamkan pendidikan kewarganegaraan melalui pendidikan formal sudah sewajarnya melahirkan warga yang mampu beradaptasi dan tidak tertinggal dalam menghadapi era disrupsi globalisasi dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.

PENUTUP

Kebijakan seharusnya bersifat umum, *problem solving*, dan proaktif tanpa menghilangkan jadi diri atau ciri lokal yang spesifik, serta harus memberi peluang interpretasi kondisi spesifik yang ada. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam upaya mempersiapkan warga negara yang baik, dalam hal ini memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skills*), karakter kewarganegaraan (*Civic Dispositions*). Masyarakat sebagai warga negara di era disrupsi globalisasi harus mampu beradaptasi, tidak mudah terpengaruh oleh dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh arus globalisasi. Proses pengembangan karakter peserta didik yang diintegrasikan kedalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus memiliki fundamental yang kuat sehingga mampu bertahan dalam menghadapi perubahan dunia yang sangat signifikan. Globalisasi dapat berdampak negatif menghilangkan identitas nasional ataupun nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan yang fundamentalnya kuat akan menghindarkan kita dari dampak negatif tersebut. Sehingga sistem pendidikan yang dikelola dan dilaksanakan dengan baik dan benar akan sangat bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan

masyarakat era disrupsi globalisasi. Evaluasi, pembenahan, dan penyesuaian kebijakan pendidikan kewarganegaraan perlu dilakukan secara berkala oleh berbagai pihak yang terlibat untuk menghindari ketertinggalan atau dampak negatif dikemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Christensen, C. M., Raynor, M. E., & McDonald, R. 2015. *What is disruptive innovation?* Massachusetts: Harvard Business Review.
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Mahfud. 2008. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Nugroho, R. 2008. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patrick, J. J. 2002. *Defining, Delivering, and Defending a Common Education for Citizenship in a Democracy*. Washington: Institute of Education Science.
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Artikel Jurnal

- Ananda, A. 2005. Esensi Pendidikan Kewarganegaraan: Sebuah Kilas Balik Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Demokrasi*. Vol. 4(1), hlm 37-47.
- Mukhadis, A. 2013. Sosok Manusia Indonesia Unggul dan Berkarakter dalam Bidang Teknologi sebagai Tuntutan Hidup di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Karakter*. Vol. 2(2), hlm 115-136.

- Pahlevi, F. S. 2017. Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dalam Memperkokoh karakter Bangsa Indonesia. *Jurnal ibriez: Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*. Vol. 2(1), hlm 65-81.
- Purwowibowo, P., Hariyono, S., & Wahyudi, D. 2017. Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis Lingkungan (Community Social Work Based on Environmental). *Share: Social Work Journal*. Vol. 7(1), hlm 39-45.
- Putranti, N. 2016. Cara Membuat Media Pembelajaran Online Menggunakan Edmodo. *Jurnal Pendidikan Informatika dan Sains*, Vol. 2(2), hlm 139-147.
- Samsuri, S. 2011. Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*. Vol. 1(2), hlm 78-213.

Internet

https://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP_2005-2025.pdf diakses pada 02 Februari 2021 pukul 08.30.

<https://divedigital.id/apa-itu-disrupsi/> diakses pada 02 Februari 2021 pukul 09.30.

<https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/fadly-pratama/kebijakan-pendidikan-kewarganegaraan-dalam-mengembangkan-karakter-nasional-di-indonesia/> diakses pada 04 Februari 2021 pukul 14.45

<https://www.kompasiana.com/karunadaran/i/54f76d8aa33311d6338b495d/pentingnya-pendidikan-kewarganegaraan-di-perguruan-tinggi-pada-era%20globalisasi> diakses pada 01 Februari 2021 pukul 14.00.

<https://kumparan.com/temali/memasuki-era-disrupsi-dan-menghadapinya-1rP1bBzWuG5> diakses pada 01 Februari 2021 pukul 14.30.